



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 3 TAHUN 2023
TENTANG
MONITORING PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2023
(1444 HIJRIAH)**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk kelancaran, ketertiban, keamanan, dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2023 (1444 Hijriah), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Untuk :

PERTAMA : Melakukan monitoring Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 (1444 Hijriah) dengan lingkup tugas:

- a. melaporkan data penumpang, barang, sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang beroperasi, serta informasi kualitatif dan kejadian menonjol yang dilengkapi dengan data dukung sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 (1444 Hijriah); dan
- c. melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 (1444 Hijriah).

KEDUA : Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan mulai tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana jadwal dan lokasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

- KETIGA : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain melakukan monitoring pada lokasi dan waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat juga melakukan monitoring pada lokasi-lokasi sesuai dengan perintah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atasan masing-masing.
- KEEMPAT : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan monitoring pada lokasi-lokasi sesuai dengan perintah Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk mendampingi kegiatan Menteri.
- KELIMA : Kepala Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini wajib berada di lokasi, guna ikut serta melakukan monitoring Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 (1444 Hijriah).
- KEENAM : Melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri melalui Biro Komunikasi dan Informasi Publik terkait dengan alur informasi dan media, dan Pusat Data dan Informasi terkait dengan data dan pelaporan.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Menteri ini dibebankan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO



LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 3 TAHUN 2023
TENTANG
MONITORING PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
LEBARAN TAHUN 2023 (1444 HIJRIAH)

I. JADWAL MONITORING PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2023 (1444 HIJRIAH)

A. PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA

NO	JABATAN	APRIL 2023																	MEI 2023	
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2
1	SEKRETARIS JENDERAL	Lokasi dan Waktu Monitoring Menyesuaikan Kondisi dan Kebutuhan di Lapangan																		
2	INSPEKTUR JENDERAL																			
3	DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT																			
4	DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT																			
5	DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA																			
6	DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN																			
7	KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI PERHUBUNGAN																			

NO	JABATAN	APRIL 2023																	MEI 2023	
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2
8	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	Lokasi dan Waktu Monitoring Menyesuaikan Kondisi dan Kebutuhan di Lapangan																		
9	KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK																			
10	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI PERHUBUNGAN																			
11	STAF AHLI BIDANG LOGISTIK, MULTIMODA, DAN KESELAMATAN PERHUBUNGAN																			
12	STAF AHLI BIDANG TEKNOLOGI, ENERGI, DAN LINGKUNGAN PERHUBUNGAN																			
13	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KAWASAN, DAN KEMITRAAN PERHUBUNGAN																			
14	STAF KHUSUS MENHUB BID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA																			
15	STAF KHUSUS MENHUB BID. HUBUNGAN INTERNASIONAL																			

B. PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

NO	JABATAN	APRIL 2023																	MEI 2023	
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2
1	KEPALA PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL	RIAU																		
2	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA					SUMATERA BARAT														
3	DIREKTUR KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA							KEPRI												
4	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SDM APARATUR PERHUBUNGAN										JAWA BARAT									
5	SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN														BANTEN					
6	KEPALA BIRO UMUM																	DKI JAKARTA		

7	KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERHUBUNGAN	JAWA TENGAH					
8	KEPALA BIRO SDM DAN ORGANISASI		D.I YOGYAKARTA				
9	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK			KALIMANTAN UTARA			
10	DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN				BALI		
11	INSPEKTUR IV					JAWA TIMUR	
12	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA						KALIMANTAN SELATAN

13	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	SULAWESI SELATAN					
14	INSPEKTUR INVESTIGASI		MALUKU				
15	KEPALA BIRO HUKUM			D.I YOGYAKARTA			
16	DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN				MALUKU UTARA		
17	KEPALA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI					RIAU	
18	INSPEKTUR II						KEPRI

19	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT	DKI JAKARTA					
20	KEPALA PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN		BANTEN				
21	SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI			JAWA TIMUR			
22	DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN				JAWA TENGAH		
23	DIREKTUR ANGKUTAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK					JAWA BARAT	
24	DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API						D.I YOGYAKARTA

25	SEKRETARIS KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI	BALI					
26	DIREKTUR KEPELABUHANAN		KALIMANTAN UTARA				
27	KEPALA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI			KALIMANTAN SELATAN			
28	KEPALA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI				SULAWESI SELATAN		
29	DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN					MALUKU	
30	DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN						MALUKU UTARA

31	INSPEKTUR I	SUMATERA BARAT					
32	DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI		KEPRI				
33	DIREKTUR ANGKUTAN UDARA			RIAU			
34	KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BMN				JAWA TIMUR		
35	DIREKTUR LALU LINTAS, BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK					DKI JAKARTA	
36	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT						JAWA BARAT

37	KETUA MAHKAMAH PELAYARAN	JAWA TIMUR					
38	KEPALA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI		JAWA BARAT				
44	DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT			DKI JAKARTA			
45	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN				D.I YOGYAKARTA		
46	DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN					SUMATERA BARAT	
47	KEPALA BIRO PERENCANAAN						KALIMANTAN UTARA

48	DIREKTUR BANDAR UDARA	KALIMANTAN UTARA					
49	Plt. KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK		JAWA TENGAH				
50	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT			SUMATERA BARAT			
51	DIREKTUR PRASARANA, BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK				DKI JAKARTA		
52	KEPALA BIRO KEUANGAN					BALI	
53	DIREKTUR KENAVIGASIAN						BANTEN

54	INSPEKTUR III	D.I YOGYAKARTA					
----	---------------	-------------------	--	--	--	--	--

II. FORMAT LAPORAN MONITORING

Laporan Monitoring Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Tahun 2023 (1444 Hijriah)
Provinsi ...

1. Dasar Hukum
 2. Personil yang ditugaskan
 3. Waktu Pelaksanaan
 4. Wilayah Monitoring
 5. Hasil Monitoring
 - a. Data per simpul transportasi yang dimonitor
 - b. Kejadian menonjol per simpul transportasi yang dimonitor
 6. Penutup
 7. Lampiran (Rincian Data dan Dokumentasi)
-

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO